

MPP Kabupaten Pangandaran Menyediakan 92 Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan dari 20 Unit Instansi Pemerintah

Anton atong sugandhi - PANGANDARAN.PUBLIKINDONESIA.COM

Jan 6, 2023 - 11:35





PANGANDARAN JAWA BARAT - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pangandaran menyediakan 92 jenis layanan perizinan dan non perizinan. Untuk mendukung pelayanan, sebanyak 20 unit Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran bergabung dalam pelayanan tersebut," Kata Bupati pangandaran H Jeje Wiradinata saat diwawancarai oleh beberapa awak media se usai meninjau gedung Mal Pelayana Publik, Jumat (06/01/2023).

Disampaikannya bahwa, demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan professional dalam melayani masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran resmi mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang rencananya akan diresmikan pada (Jumat, 27/01/2023).

Adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Pangandaran ini didirikan berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573) dan Peraturan Bupati Pangandaran No 70 Tahun 2022 tentang Mal Pelayanan Publik.

Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pangandaran ini berada di depan Alun-alun Parigi tepatnya di sebelah timur. MPP ini hadir sebagai solusi atas keresahan masyarakat Pangandaran dalam mengurus perizinan yang selama ini harus menempuh jarak jauh ke kabupaten terdekat. Inovasi tersebut merupakan jawaban dalam mempermudah segala pelayanan yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Pangandaran," Kata Jeje.

Menurutnya, MPP Kabupaten Pangandaran ini menyediakan 92 jenis layanan

perizinan dan non perizinan. Untuk mendukung pelayanan, sebanyak 20 unit Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran bergabung dalam pelayanan tersebut.

Berikut ini beberapa instansi dan pelayanannya yang bergabung di MPP Kabupaten Pangandaran :

1. Dinas PMPTSP

A. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui OSS

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Sertifikat Standar Menengah Rendah (SS-MR)
3. Sertifikat Standar Menengah Tinggi (SS-MT)
4. Izin
5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

B. Non Perizinan Melalui Sicantik

C. Layanan Informasi Investasi

D. Layanan Pengaduan Perizinan Non Perizinan

2. DPMPTSP Provinsi

1. Layanan Informasi
2. Helpdesk Layanan NIB
3. Pengaduan

3. DISDUKCAPIL

1. Kartu Keluarga
2. KTP
3. KIA
4. Akte Kelahiran
5. Akte Kematian

4. DPUTRPRKP

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
3. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)
4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
5. Rencana Teknis Pembongkaran (RTB)
6. Pengesahan Site Plan
7. Rekomendasi Peil Banjir
8. Rekomendasi Teknis

5. BAPENDA

1. Pelayanan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

6. DINAS KESEHATAN

1. Rekomendasi Perizinan
2. Pengaduan Pelayanan Kesehatan

7. DLHK

1. Rekomendasi Pernyataan Kesanggupan
2. Rekomendasi Persetujuan Teknis Limbah B3
3. Rekomendasi Rincian Teknis Limbah B3

4. Rekomendasi Persetujuan Teknis Limbah Cair, Udara/Emisi
5. Sertifikat Layak Operasional Usaha/ Kegiatan

8. PERINDAGKOP UKM

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)
2. Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)

9. DISNAKER

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK 1)
2. Pelayanan Rekomendasi Paspor CPMI
3. Pelayanan Legalisir Paklaring
4. Pelayanan Rekomendasi Ijin LPK

10. KEMENTERIAN AGAMA

- Layanan Wakaf
- Layanan Pendaftaran Nikah Online
- Sertifikat Jaminan Produk Halal
- Bimbingan Perkawinan Mandiri
- Layanan Nomor Statistik Masjid

11. POLRES KABUPATEN PANGANDARAN

- Pelayanan Pajak Kendaraan

12. PENGADILAN NEGERI

1. Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court
2. Permohonan Surat Keterangan Melalui Aplikasi Eratering
3. Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Perpanjangan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi Melalui Aplikasi e-Berpadu
4. Pendaftaran Surat Kuasa Online
5. Pelayanan Perlindungan Hukum dan Pengaduan Melalui E-Peduli
6. Pelayanan Informasi Melalui PTSP Online
7. Pelayanan Pengaduan Melalui Aplikasi Siwas
8. Pelayanan Informasi Denda Pelanggaran Lalu Lintas
9. Pelayanan Permohonan Salinan Putusan 1

13. PENGADILAN AGAMA CIAMIS

- Informasi
- E-Court
- Gugatan Mandiri

14. BPJS KETENAGAKERJAAN

- Pelayanan Informasi
- Pendaftaran Peserta Baru
- Pencetakan Dokumen Kepesertaan
- Koreksi Data

15. BPJS KESEHATAN

- Permintaan Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP)
- Pendaftaran Baru
- Perubahan Data

16. BJB PANGANDARAN

- Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah (PBB, PJHTB dan PJDL)
- Pembayaran Retribusi Dan Pajak Kendaraan

17. PDAM

- Pelayanan Loker Pembayaran
- Pelayanan Pemasangan Baru
- Pelayanan Penggunaan Pelanggan

18. PD BPR BKPD PANGANDARAN

- Pelayanan Tabungan
- Pelayanan Deposito
- Pelayanan Kredit
- Jasa Perbankan Lainnya

19. SAMSAT

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- BBNKB (BBN 1)
- BBN 2
- Pajak Permulaan
- PBBKB

20. KEJAKSAAN NEGERI

- Informasi Penerimaan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia
- Penyuluhan Hukum
- Layanan Pengambilan Tilang
- Layanan Jadwal Persidangan
- Layanan Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat
- Pelayanan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Layanan Pengambilan dan Pengantaran Barang Bukti," paparnya.

Adapun, tambah jeje, dengan terwujudnya Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pangandaran ini, Pemerintah daerah selalu berharap dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, serta layanan pasti untuk seluruh masyarakat Pangandaran yang akan mengurus perizinan dari seluruh aspek bidang," Ujarnya.** (Anton AS)